

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses globalisasi perdagangan telah meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan dapat segera diketahui oleh masyarakat umum baik melalui internet maupun media tradisional lainnya. Jumlah perusahaan yang berdiri dan bergabung dengan dunia bisnis Indonesia semakin meningkat. Perusahaan tersebut bersaing untuk meraih pelanggan sebanyak mungkin, mencapai tujuan ekspansi, menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kinerja khususnya kinerja keuangannya (Wuryanti K. Dan Siti Khotimah 2015).

Kinerja Keuangan menurut Helfert (2008) dalam Wuryanti K. Dan Siti Khotimah (2015) adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan, dari laporan tersebut dapat dinilai sejauh mana manajemen mampu mengolah aset perusahaan dan dapat menilai bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber modal/dana yang memadai (Wuryanti K. Dan Siti Khotimah 2015). Ujijantho dan Pramuka (2007) dalam Wuryanti K. Dan Siti Khotimah (2015) menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan

dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menjadi acuan investor dalam membeli saham. Bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham perusahaan tetap menarik bagi investor (Novi 2012).

Ada beberapa fenomena yang terjadi mengenai kinerja perusahaan yang terjadi pada beberapa perusahaan manufaktur, dan berikut ini adalah beberapa diantaranya.

Fenomena yang terjadi di PT Astra International Tbk, kinerja PT Astra International Tbk (ASII) di sembilan bulan pertama tahun ini kurang mengembirakan. Di kuartal III-2015, laba bersih perseroan turun 17% dari Rp 14,499 triliun menjadi Rp 11,997 triliun. Laba bersih per saham juga turun dari Rp 358 ke Rp 296 per saham. Pendapatan bersih konsolidasian juga menurun 8% menjadi Rp 138,177 triliun dari Rp 150,582 triliun di kuartal III-2014.

Merosotnya kinerja perseroan disebabkan oleh penjualan mobil yang menurun 20% dan penjualan motor menurun 14%. Selain segmen otomotif, alat berat dan pertambangan, serta agribisnis juga berkontribusi menekan laba perseroan. Prijono menjelaskan, Grup Astra menghadapi penurunan konsumsi domestik, persaingan di pasar mobil, pelemahan harga komoditas dan penurunan kualitas kredit korporasi dalam sembilan bulan pertama tahun ini, sehingga kontribusi dari seluruh segmen bisnis menurun kecuali alat berat dan pertambangan (www.finance.detik.com, Kamis, 29/10/2015, 17:20 WIB).

Selanjutnya fenomena yang terjadi di PT Bumi Resources Tbk. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih mencatat kinerja yang negatif di akhir 2013. Perusahaan tambang itu masih rugi US\$ 609 juta (Rp 6,09 triliun). Rugi ini sudah berkurang jika dibandingkan rugi di tahun sebelumnya US\$ 666 juta (Rp 6,66 triliun). Seperti dikutip dari laporan kinerja keuangan BUMI, Senin (14/4/2014), menutup tahun 2013 pendapatan tambang milik Grup Bakrie tercatat sebesar US\$ 3,54 miliar, turun tipis 6,04%, jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 3,77 miliar.

Beban perseroan malah naik, terutama gara-gara harga jual batu bara yang masih rendah. Beban BUMI di akhir 2013 dibukukan sebesar US\$ 2,81 miliar, bandingkan dengan tahun lalu US\$ 2,791. Naiknya beban ini membuat laba kotor perseroan anjlok 30,25% menjadi US\$ 686,20 juta di akhir 2013, lebih kecil dari sebelumnya US\$ 983,90 juta. Perseroan mengalami rugi selisih kurs yang bertambah banyak menjadi US\$ 136,90 juta pada 2013, padahal di tahun sebelumnya hanya US\$ 47,89 juta. Hal yang menyumbang kerugian perusahaan. Berkurangnya kerugian perseroan ini berimbas kepada berkurangnya rugi per saham perusahaan, yaitu dari US\$ 32,82 per 1.000 lembar saham menjadi hanya US\$ 30 per 1.000 lembar saham. (**www.finance.detik.com, Senin, 14/04/2014, 13:44 WIB**)

Menurut Gray et al (1987) dalam Wuryanti K. Dan Siti Khotimah (2015) perusahaan bertanggungjawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan

tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain:

- a. *Basic Responsibility*, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan.
- b. *Organizational Responsibility*, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*.
- c. *Societal Responsibility*, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Selain laba (profit) dan pertumbuhan, tak kalah pentingnya yaitu keberlangsungan atau sustainability (Sembiring:2005 dalam Novi, 2012). Kunci utama pencapaian keberlangsungan adalah adanya penerimaan publik akan kehadiran perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang diinginkan publik tidak hanya berupa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial, melainkan dalam bentuk suatu pengintegrasian kegiatan bisnis dan operasional dengan aspek sosial (Wayan:2007 dalam Novi, 2012). Keberlangsungan dapat dicapai dengan lahirnya suatu konsep yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham (Kiroyan:2006 dalam Novi 2012).

Akan tetapi, perusahaan terkadang melalaikan tuntutan tanggung jawab sosial tersebut dengan alasan bahwa *stakeholders* tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan karena hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non reciprocal yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik (Anggraini:2006 dalam Marissa, Dianne dan Rizky, 2013). Selain itu, hal ini juga dikarenakan awal dari budaya perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan yang dilihat dari untung atau rugi, sedangkan keikutsertaan perusahaan dalam tanggung jawab sosial justru dianggap menambah biaya karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengolahan limbah, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan, strict control terhadap produk agar ramah lingkungan. Semuanya itu menambah biaya perusahaan yang akan mengurangi pembagian keuntungan (dividen) bagi investor (Lindrawati, Felicia dan Budianto:2008 dalam Marissa, Dianne dan Rizky, 2013). Namun, riset yang dilakukan oleh Roper Starch Worldwide (1997) dalam Marissa, Dianne dan Rizky (2013) menunjukkan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pengembangan

Ada beberapa fenomena mengenai CSR, diantaranya yaitu kasus PT Newmont Minahasa Raya di Buyat, PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, dan PT Freeport di Papua.

Kasus yang terjadi pada PT Newmont Minahasa Raya di Buyat. Dari data hasil penelitian Tim Terpadu di Teluk Buyat, menurut kalangan praktisi hukum,

telah cukup bukti bahwa PT Newmont Minahasa Raya melakukan pelanggaran perizinan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Pemerintah dan PT Newmont Minahasa Raya merupakan pelaku utama atas kejahatan pencemaran dan kesehatan masyarakat. "Dari kajian hukum yang dilakukan diperoleh cukup bukti bahwa PT NMR melakukan beberapa pelanggaran perizinan, sehingga terjadi pencemaran di Teluk Buyat" jelas Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indro Sugianto. Indro menyatakan hal itu dalam jumpa pers membeberkan hasil penelitian Tim Teknis Kasus Buyat di Gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (10/11/2004).

Dalam jumpa pers tersebut, hadir Ketua PBHI Jhonson Panjaitan, Raja Siregar (Walhi) dan Siti Maimunah (Jatam). Menurut Indro, pelanggaran pertama yaitu soal syarat perizinan usaha yang diindikasikan dengan pelanggaran Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengawasan Lingkungan (RPL). Kedua, pelanggaran terhadap izin pengelolaan *tailing* (limbah batuan tambang berbentuk lumpur logam berat) sebagai limbah B3 dan ketiga, pelanggaran izin pembuangan limbah tambang (*dumping tailing*) ke laut. Semuanya diduga melanggar PP No 18/1999, PP No 85/1999 dan UU No.23/1997.

Sumber : <http://news.detik.com/berita/239360/cukup-bukti-pemerintah--newmont-telah-cemari-buyat>

Selanjutnya kasus pada PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Tidak tertanggulangnya semburan lumpur Lapindo dengan baik berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan. Bahkan, saat ini lebih kurang 5.000 hektar

dari 15.000 hektar tambak tercemar lumpur. Jika luapan lumpur tidak segera ditangani, pencemaran itu akan semakin meluas.

“Tambak-tambak itu digunakan untuk budidaya udang dan bandeng. Pencemaran lumpur membuat usaha ini semakin terpuruk dan merugikan masyarakat,” kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tambak Sidoarjo, Syaiful Ilah, seperti dilaporkan *Harian Kompas*, Kamis (20/11).

Petambak di Sidoarjo sebenarnya ingin melakukan protes keras atas pencemaran itu. Kualitas air dan tambak turun sehingga mengganggu budidaya udang. Namun, rencana itu berhasil diredam (<http://energitoday.com/2014/11/lumpur-lapindo-cemari-tambak-di-sidoarjo>)

Meski aktivitas semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur sudah mengalami penurunan, potensi bahaya masih tinggi. Potensi bahaya itu khususnya pencemaran tanah dan sumber air di desa-desa sekitar kawah lumpur panas tersebut. Bahaya yang paling menyolok adalah jebolnya tanggul-tanggul penahan luberan lumpur panas, seperti yang terjadi pada Rabu pagi lalu (10/9), di sisi utara pusat semburan, atau tepatnya di titik 68 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin. Sudah puluhan rumah, setidaknya sudah tercatat 20 rumah di desa luar peta terdampak itu terkena imbas luberan lumpur berbahaya tersebut. Jika tidak segera di atasi, luberannya akan merembes ke mana-mana. Bahkan, dimungkinkan, tanggul sisi barat juga akan ikut jebol, jika Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak segera turun tangan

(<http://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-geologi-lumpur-lapindo-brantas-cemari-tanah-air-warga.html>)

Berdasarkan berita resmi yang dilansir Pemprov Jatim, sejumlah 12 anggota pansus lumpur Lapindo DPRD Kabupaten Sidoarjo menemui Menteri PUPR. Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan warga a.l. Uripin dari Desa Kedung Bendo dan Mahmuda dari Desa Reno Kenongo. Sementara itu, Menteri PUPR didampingi Sekretaris Jenderal PUPR, Taufik Widjoyono, dan Inspektur Jenderal, Rildo Anwar. Jumlah dana talangan yang akan dibayar pemerintah untuk korban lumpur Lapindo mencapai Rp781 miliar. Pemerintah akan memperoleh jaminan terhadap pembayaran tanah korban Lapindo yang sudah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo dengan nilai Rp 2,7 triliun. Pemerintah memberikan dana talangan pembayaran ganti rugi 20% warga di area terdampak Lumpur Lapindo yang tidak mampu dibayar oleh PT Minarak setelah perusahaan ini mengklaim tidak sanggup membayar. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus hadir dalam upaya ganti rugi korban lumpur Lapindo, baik pada area terdampak maupun area tidak terdampak. Sesuai hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sudah dibeli oleh Lapindo Rp2,7 triliun ini akan dijamin kepada pemerintah. Begitulah kesepakatannya.

(<http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/15/446409/lumpur-lapindo-akhirnya-ganti-rugi-dibayarkan-pada-tanggal-ini>)

Selanjutnya Kasus kontroversial berkaitan dengan isu tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Freeport di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional (MNC), yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia.

Contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia :

- Mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia (FI) tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam USD 1,5–USD 3. Padahal, bandingan gaji di negara lain mencapai USD 15–USD 35 per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.

- Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua

sampai tujuh turunan. Selain bertentangan dengan **PP 76/2008** tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport (**Davis, G.F., et.al., 2006**). Kestabilan siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua memiliki magnitudo luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional, bahkan global.

Sebagai perusahaan berlabel MNC (*multinational company*) yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak (<http://prasetyokoko.blogspot.co.id/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis-pada-pt.html>)

Dalam meningkatkan kinerja keuangan maupun CSR tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Dani dan Hasan (2005) dalam Like Monisa Wati (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Agus Sartono (2010:120) dalam Shella, Siti Ragil dan Rd

Rustam (2014) juga menyatakan bahwa “*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiaya investasinya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis leverage ikut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Tariq et al (2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan, pajak, non debt tax Shield dan likuiditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR diteliti oleh Kokubu et al. (2001) dalam Yulia dan Melvie (2011) yaitu mekanisme tata kelola perusahaan /*Good Corporate Governance* (GCG). Mia dan Al Mamun (2011) dalam Rafika (2014) berpendapat bahwa perusahaan dengan leverage tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang makin banyak.

Maka dari pernyataan-pernyataan diatas membuktikan bahwa diantaranya Kinerja keuangan dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, ukuran perusahaan, pajak, non debt tax Shield dan likuiditas. Tetapi yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya dua faktor yaitu *Good Corporate Governance* dan *Leverage*.

Faktor pertama yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate Governance* adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam

segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan (Jill et. al:2005. Dalam Wuryanti K. Dan Siti Khotimah,2015)

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung keefektifan dan efisiensi dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG yaitu ; keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan independensi (*independency*). Tata kelola yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Achmad Daniri;2006. Dalam Wuryanti dan Siti,2015)

GCG akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan (CSR) termasuk terhadap lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa dalam tata kelola organisasi (korporasi), direksi atau pengelola harus memperhatikan pihak atau kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham, melainkan untuk semua pemangku kepentingan. Teori ini menegaskan bahwa penting bagi sebuah perusahaan untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan (Wuryanti K dan siti Khotimah 2015).

Faktor Selanjutnya yaitu faktor kedua adalah Leverage. Weston dan Brigham (1994) dalam Wuryanti K. Dan Siti (2015) mengatakan *leverage* merupakan keadaan yang terjadi pada saat perusahaan memiliki biaya tetap yang harus ditanggung. Seberapa besar biaya tetap operasi perusahaan merupakan bagian dari biaya total operasi suatu perusahaan. Sumarjo (2010) dalam Wuryanti dan Siti (2015) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* semakin menunjukkan

entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk (Perwitasari;2010. Dalam Wuryanti K dan Siti, 2015)

Menurut Belkaoui dan karpik (1989) dalam Eddy (2005) dan Wuryanti K. (2015), Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholder*.

Didasari oleh riset yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini didasarkan replikasi dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini meneliti perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Alasan peneliti mengambil perusahaan peserta CGPI karena penelitian ini salah satu variabelnya menggunakan Good Corporate Governance.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH GOOD CORPORATE**

GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN DAMPAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI Yang Terdaftar di BEI periode 2010-2013)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok masalah yang akan diteliti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
2. Bagaimana gambaran tingkat *Leverage* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
3. Bagaimana gambaran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
4. Bagaimana gambaran tingkat kinerja keuangan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
5. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* baik secara parsial maupun

simultan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

6. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
7. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* serta dampak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode yang diamati.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
2. Untuk mengetahui gambaran tingkat *Leverage* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
3. Untuk mengetahui gambaran pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
4. Untuk mengetahui gambaran tingkat kinerja keuangan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social responsibility* baik parsial maupun simultan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja keuangan baik parsial maupun simultan pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya terhadap kinerja keuangan baik parsial maupun simultan pada perusahaan

peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

(1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perusahaan manufaktur untuk dapat tetap melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

(2) Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi.

(3) Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dampaknya

terhadap tingkat kinerja perusahaan serta dapat memberikan sumbangan pengeluaran bagi peneliti lainnya mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran yang berguna bagi perusahaan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam menyusun skripsi ini melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id, perpustakaan lokal dan perpustakaan umum. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sejak bulan Januari 2016 hingga selesai.